

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
TAHUN 2025**

1. PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2. JABATAN : KEPALA PELAKSANA
3. TUGAS : Mengoordinasikan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan subbidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
4. FUNGSI :
  - a. melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
  - b. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
  - c. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
  - e. mengoordinasikan penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
  - f. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
  - g. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan.

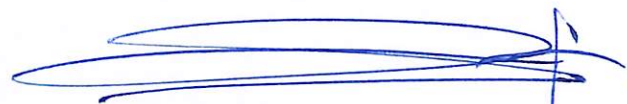
**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	PD	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	73
4	Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	18,11
5	Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	19,55
6	Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100
7	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	Dokumen	2
8	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	19,25
9	Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100
10	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
11	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100

12	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3
13	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
14	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
15	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentas Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
16	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
17	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
19	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
20	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
21	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA PELAKSANA



SETIANTO NUGROHO AJI, S.H., M.Si  
Pembina Utama Muda /IV/c  
NIP. 19671027 199403 1 008